



DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN

Leonard Felix Hutabarat^{1*}, Angel Damayanti¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Kristen Indonesia; Indonesia

*email: lfhutabarat@gmail.com

Abstract

South-South cooperation has played a significant role in encouraging development through strategic programs, such as training, providing grants, and women empowerment. This article aims to identify that Indonesian diplomacy in this South-South Cooperation has been meant to strengthen Indonesia's role as a new emerging donor to achieve Indonesian economic interests in the future. Development of Indonesian South-South cooperation could be explained in the liberalism perspective, particularly the economic diplomacy concept. The research method used is descriptive qualitative. The results stated that the contribution of South-South cooperation is as a bridge between beneficiaries and Indonesia's interests, improving Indonesia's positive image, and part of Indonesia's economic diplomacy. In the post-Covid-19 pandemic, South-South cooperation is expected to be a part of the development cooperation form and one of the instruments for restoring conditions and building back better in achieving the goals of SDGs 2030.

Keywords: diplomacy; Indonesia; South-South cooperation

Abstrak

Kerja sama Selatan-Selatan berperan penting dalam mendorong pembangunan melalui program strategis, seperti pelatihan, pemberian hibah, dan pemberdayaan perempuan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi diplomasi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai *new emerging donor* guna mencapai kepentingan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Pengembangan kerja sama Selatan-Selatan Indonesia dapat dijelaskan dengan perspektif liberalisme, khususnya konsep diplomasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerja sama Selatan-Selatan memberikan manfaat sebagai jembatan antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan Indonesia, meningkatkan citra positif Indonesia, dan menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pasca pandemi Covid-19, kerja sama Selatan-Selatan juga menjadi salah satu bentuk kerja sama pembangunan dan salah satu instrumen untuk pemulihan kondisi serta *building back better* dalam pencapaian tujuan SDGs 2030.

Kata Kunci: Diplomasi; Indonesia; Kerja Sama Selatan Selatan

Pendahuluan

Perjalanan historis kerja sama Selatan-Selatan (*south-south cooperation*) Indonesia diawali dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) ini merupakan kerja sama teknik yang diselenggarakan oleh sesama negara-negara berkembang yang bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan, keterampilan, *expertise*, dan sumber daya dalam mencapai agenda pembangunan dan kemandirian bersama. Kerja sama yang dilandasi oleh prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, non-kondisionalitas, *mutual benefits* dan *non-interference* ini berkembang dari 10 Kesepakatan KAA yang tertuang dalam Dasasila Bandung (Kementerian Luar Negeri, 2015, 2020).

Program KSS Indonesia telah terinstitusionalisasi dan diimplementasikan secara rutin sejak tahun 1980-an. Namun baru mulai tahun 2010, KSS menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Program ini berlanjut terus hingga 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2010, 2015, 2020). Di tahun yang sama penguatan kelembagaan KSS dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). Tim ini diresmikan melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. 67 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Untuk meningkatkan peran Indonesia dalam KSS, pada tahun 2019 dibentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang dikenal juga sebagai *Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID)*. Dalam peresmian LDKPI, Wakil Presiden RI kala itu, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembentukan LDKPI merupakan salah satu bentuk perwujudan “diplomasi tangan di atas” yang akan menguatkan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan internasional (Gewati, 2019). LDKPI melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2019 bertugas melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan adalah bagian dari perspektif liberalisme. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat politis, ekonomi maupun sosial budaya, namun juga kerja sama yang dibangun untuk saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama (Ruggie, 1998). Liberalisme komersial (*commercial liberalism*) yang terjadi dengan adanya interdependensi ekonomi (Bakry, 2017: 104) akan menciptakan hubungan yang stabil dan terus berkembang guna mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara (Nugroho, 2021: 62). Kepentingan negara menjadi bagian penting yang dibangun dalam struktur politik internasional (Griffiths, 1999: 201). Dalam konteks ini KSS Indonesia menjadi bagian praktis dari perspektif liberalisme, khususnya terkait semangat komersial dalam politik ekonomi internasional dan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan institutionalisme (*institutionalism*) dalam kerja sama internasional (Hadiwinata, 2017: 87).

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dalam program KSS adalah upaya mewujudkan kepentingan politik dan ekonomi Indonesia dalam kebijakan luar negerinya. Diplomasi ekonomi sebagai praktek dan strategi kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Program KSS Indonesia adalah bagian yang disebut sebagai “*inducements*” dalam diplomasi ekonomi. Okano-Heijmans (2011; 2012) juga menegaskan bahwa *positive incentives (inducements)* adalah bagian dari diplomasi ekonomi.

Upaya ini juga akan meningkatkan citra positif Indonesia dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan global, khususnya dalam upaya mewujudkan sasaran dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) 2030 (Hakim et al., 2021; Pujayanti, 2015). Kepentingan Indonesia tidak hanya terkait citra, namun juga kepentingan nasional yang lebih jauh lagi, termasuk dalam konteks diplomasi ekonomi (Haryono, 2019; Hutabarat, 2018; Sukma, 2012).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres pada 2021 menyatakan “*the world seeks to ramp up COVID-19 response and recovery and tackle the existential threat of climate change, South-South and triangular cooperation is more essential than ever.*” Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, Yayan G. H. Mulyana (Mulyana, 2022) dalam webinar

nasional “Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama”, Universitas Muhammadiyah Malang, tanggal 22 Juli 2022. Pernyataan Sekjen PBB ini sekaligus juga menunjukkan bahwa KSS Indonesia menjadi salah satu solusi dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Itu sebabnya, sebagai bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Kornas KSS, BSKLN, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas penting dalam KSS dan pencapaian SDGs, yakni: melakukan monitoring dan evaluasi (monev), publikasi, promosi, sosialisasi, dan manajemen pengetahuan KSS. Di samping itu, sejalan dengan pernyataan Sekjen PBB, pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi arah dari pengembangan KSS Indonesia ke depannya (Dinnata & Nuraeni, 2020; Lestari et al., 2020; Zakaria, 2020). Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang pasca tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

Konsep Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Selatan-Selatan

Perkembangan kerja sama Selatan-Selatan sebagaimana disebutkan oleh *United Nations Office for South-South Cooperation* (UNOSSC) memiliki kerangka yang lebih luas dan berkaitan dengan aspek kepentingan ekonomi, yaitu:

“a broad framework for collaboration among countries of the South in the political, economic, social, cultural, environmental and technical domains. Involving two or more developing countries can take place on a bilateral, regional, sub-regional or interregional basis. Developing countries share knowledge, skills, expertise, and resources to meet their development goals through concerted efforts. Recent developments in South-South cooperation have taken the form of an increased volume of South-South trade, South-South flows of foreign direct investment, movements towards regional integration, technology transfers, sharing of solutions and experts, and other forms of exchanges” (Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, 2019).

Namun, dalam perkembangannya KSS bergerak ke arah kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan tujuan mendorong pembangunan nasional serta meningkatkan daya saing negara berkembang (Kementerian Sekretariat Negara, 2020, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa KSS berfungsi sebagai *collective leverage* di berbagai forum internasional sekaligus juga penunjang pembangunan nasional untuk mengoptimalkan potensi pembangunan yang ada (Fitriani & Panduwinata, 2018; Kementerian Luar Negeri, 2016).

Saling ketergantungan antarnegara dalam sistem politik internasional saat ini menyebabkan banyak negara memiliki perspektif pluralisme atau liberalisme dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, khususnya kepentingan ekonomi (Gilpin, 2000; Hutabarat, 2005; Masoed, 1994; Moons & van Bergeijk, 2017; Okano-Heijmans, 2012; Viotti & Kauppi, 1993). Negara melakukan diplomasi ekonomi dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Terkait diplomasi ekonomi, Lee & Hocking (2010) menyebutkan peran penting aktor diplomatik dan hubungan yang terjalin, aktivitas serta institusi dimana aktor tersebut bekerja dalam menciptakan dan mengelola kesalingtergantungan ekonomi.

Dalam hal ini, diplomasi ekonomi dipandang sebagai alat untuk mengejar dan mencapai keamanan ekonomi di dalam sistem internasional yang anarkis. Dengan konsep diplomasi ekonomi yang diwarnai pemikiran kelompok liberalisme, negara-negara berusaha untuk memahami interaksi ekonomi internasional yang berbasis pada kepentingan ekonomi (Killian, 2022; Lee & Hudson, 2004; Sabaruddin, 2017; Woolcock, 2012a). Dengan demikian, konsep ini dapat menjelaskan kepentingan ekonomi yang akan dicapai Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan, termasuk upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia.

Konsep diplomasi ekonomi di atas dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan negara dalam berinteraksi dengan dunia luar guna memaksimalkan *national gains* pada semua aktivitas, termasuk perdagangan, investasi dan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat ekonomi lainnya (Rana, 2012; Strange, 1992; Woolcock, 2012b). Dalam konteks ini, dua tujuan kebijakan luar negeri dari diplomasi ekonomi adalah “*enhancing national economic prosperity through political means*” dan “*increasing political stability of the nation through the use of economic leverage.*”

Lebih spesifik, Okano-Heijmans (2011), menjelaskan diplomasi ekonomi sebagai praktik dan strategi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada premis bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan saling memperkuat satu sama lain dan dengan demikian harus dilihat sebagai satu kesatuan. Okano-Heijmans (2012) juga menegaskan bahwa *positive incentives (inducements)* adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Serupa dengan itu, Rana (2012) mengonfirmasi bahwa bantuan ekonomi yang diberikan negara donor, termasuk bantuan teknis, adalah bagian dari diplomasi

ekonomi. Dengan demikian pemberian bantuan pembangunan dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan dan kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia (Dinnata & Nuraeni, 2020).

Metode

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menjelaskan bagaimana KSS Indonesia dapat menjadi solusi dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan. Metodologi kualitatif memungkinkan para peneliti untuk memahami berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam konteks sosialnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks terhadap kondisi yang terjadi. Hal ini didasari pada asumsi, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2008), bahwa dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang ada di sekitarnya.

Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan observatif eksploratif dan deskriptif analitis serta menggunakan data primer dan sekunder. Triangulasi data juga dilakukan melalui *focused group discussion* guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang berguna Kepala Biro Kerja Sama Teknik, Kementerian Sekretariat Negara dan Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian Luar Negeri Tim Kornas KSS Indonesia merupakan narasumber yang dipilih untuk FGD dengan pertimbangan sebagai bagian dari Tim Kornas KSS Indonesia. Peranan dari para narasumber adalah menjelaskan perkembangan KSS Indonesia dan upaya pengembangan program di masa yang akan datang. Para penulis juga menggunakan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder (Sugiyono, 2006; Yusuf, 2014; Sudaryono, 2021).

Perkembangan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 telah melahirkan 10 Kesepakatan yang tertuang dalam Dasasila Bandung. Kesepakatan tersebut menjadi dasar kerja sama dan solidaritas antar negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika, dan selanjutnya berkembang menjadi dasar kerja sama dan solidaritas negara-negara di dunia. Pelaksanaan KSS Indonesia sendiri terus mengalami evolusi

sejak diselenggarakannya KAA. KSS Indonesia terus berevolusi dan mengalami pengembangan dan penguatan kelembagaan. Hal ini menjadikan KSS Indonesia semakin transparan, akuntabel, terarah dan strategis.

Milestone KSS Indonesia meliputi: (a) *Colombo Plan* 1948; (b) KAA 1955; (c) *Conference on Technical Cooperation for Developing Countries/BAPA* 1978; (d) Pembentukan Tim Kornas KSS Indonesia 2010; dan (e) Pembentukan LDKPI 2019. Pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang dikenal juga sebagai *Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID)* tahun 2019 lalu menjadi tonggak bersejarah dalam upaya Indonesia untuk lebih berperan sebagai negara pemberi bantuan internasional.

Di samping itu, Indonesia senantiasa memandang KSS sebagai perwujudan solidaritas dan kerja sama guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian bersama atas dasar solidaritas, kepentingan bersama dan keuntungan bersama sesama negara berkembang. Indonesia senantiasa berkeinginan menjadi *true partner for development* melalui KSS Indonesia bagi negara-negara berkembang. KSS telah menjadi modalitas dan alat strategi yang vital bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/ MDGs*) dan kemudian dikembangkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) bagi Indonesia dan negara-negara berkembang.

Gambar 1 - Perkembangan Kebijakan Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan



Sumber: (Direktorat KSPI, Kementerian Luar Negeri, 2022)

Selama satu dekade sejak 2010 hingga 2020, Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri telah mengidentifikasi lebih dari 400 program KSS dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 6.500 orang. Program KSS tersebut terdiri dari berbagai program pelatihan, lokakarya, pemagangan, pengiriman tenaga ahli, beasiswa untuk program gelar dan non-gelar, pemberian hibah, dan penyediaan infrastruktur di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, energi, demokrasi dan *good governance*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kewirausahaan, infrastruktur, manajemen resiko bencana, dan pemberdayaan perempuan.

Dalam perjalanan selama satu dekade terakhir, Tim Kornas KSS senantiasa melakukan pembenahan diri untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan akuntabilitas. Hal itu direalisasikan oleh KSS Indonesia melalui antara lain, penyusunan pedoman (*guidelines* dan *standard operating procedures*) untuk *capturing demand*, melibatkan *non-state actors*, strategi komunikasi, serta instrumen monitoring dan evaluasi untuk program pelatihan, workshop dan *expert dispatch*.

Salah satu pelaksanaan tugas dalam bentuk strategi komunikasi dan sosialisasi dari Tim Kornas KSS adalah penyelenggaraan berbagai seminar. Hal ini dilakukan Tim Kornas KSS misalnya ketika bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) tanggal 22 Juli 2022 menyelenggarakan Webinar Nasional berjudul “Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan KSS nasional, antara lain meliputi: Kementerian Sekretariat Negara; NAM-CSSTC; *Japan International Cooperation Agency* (JICA); dan akademisi HI UMM.

KSS juga telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia dan masuk dalam prioritas nasional 7 mengenai stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Gambaran tentang KSS yang telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 terlihat dalam gambar di bawah ini. Program kerja KSS Indonesia telah masuk sebagai bagian dari prioritas nasional dan optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Prioritas nasional tersebut antara lain, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,

SDM berkualitas dan berdaya saing, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sejak menjadi *middle-income country*, peran Indonesia dalam KSS mulai berubah dari negara penerima menjadi salah satu negara “*new emerging donors*”, yang secara konsisten memberikan bantuan kerja sama teknik maupun hibah. Sebagai perwujudan diplomasi sebagai negara donor tersebut, pada tahun 2019 dibentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang dikenal juga sebagai *Indonesia Agency for International Development (Indonesian AID)*. Saat ini, program unggulan KSS Indonesia mencakup: (a) agrikultur, *food security*, dan jaminan sosial; (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan industri; (e) pembangunan manusia; dan (f) infrastruktur.

Peran KSS di tingkat global menjadi semakin penting, terutama ketika menghadapi berbagai ancaman non-tradisional seperti bencana alam dan sakit penyakit. Sebagai bentuk solidaritas, Indonesia turut membantu negara-negara sahabat yang tengah menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh bencana alam, krisis kebutuhan primer, dan situasi akibat konflik. Indonesia telah berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan, di antaranya 12,9 ton bahan makanan dan minuman serta beberapa kebutuhan bagi korban bencana Topan Tropis Harold di Fiji tahun 2020, seperti tenda peleton, tenda regu, handuk, selimut untuk korban (Mulyana, 2022).

Ketika pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia sejak tahun 2020, dampaknya sangat terasa pada sebagian besar sektor kehidupan masyarakat, seperti perekonomian, kesehatan, pariwisata, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* oleh tiap negara di dunia. Indonesia menyumbangkan 100 ribu dosis vaksin yang dibuat oleh Biofarma ke Nigeria tahun 2022 sebagai salah satu bentuk dukungan negara donor untuk penanggulangan pandemi Covid-19 (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Keterlibatan BUMN Indonesia sebagai instansi pelaksana dalam hal bantuan pembangunan infrastruktur di negara penerima bantuan, turut meningkatkan profil pelaku pelaku usaha Indonesia di negara penerima. Indonesia turut memberikan dukungan hibah bagi peningkatan kapasitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negara-negara penerima baik melalui mekanisme kerja sama Selatan-Selatan maupun *Triangular* (Kementerian Luar Negeri, 2022). Oleh sebab itu,

pelaksanaan KSS Indonesia mendukung pelaksanaan kebijakan, diplomasi dan peningkatan citra positif Indonesia sesuai dengan kepentingan strategis Indonesia (Sukma, 2012).

Pengembangan Program KSS Indonesia untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Global

Kerjasama Selatan-Selatan telah menjadi modalitas dan strategi yang vital bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang kemudian berkembang menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). *Millennium Development Goals* meliputi aspek-aspek *focused on human development, targeting developing countries, and developed by experts*. Sedangkan *Sustainable Development Goals* mencakup *people, prosperity, planet, peace & partnership, targeting all countries (developed and developing countries), and developed by government, experts and civil society*.

Program KSS dalam SDG selama satu dekade terakhir dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori orientasi atau klaster SDGs, yaitu: *people (SDG 1-5)*, *prosperity (SDG 6-10)*, *planet (SDG 11-15)*, *peace and partnership (SDG 16-17)*. Pada kategori *people*, program pertama yang paling banyak berkontribusi adalah pada SDG 4 (*Quality Education*) melalui program beasiswa dengan jumlah peserta mencapai 496 dari 219 negara. Sedangkan program kedua adalah pada SDG 3 (*Good Health and Well-Being*) melalui pelatihan dengan total peserta sebanyak 126 dari 30 negara. Program kedua adalah pada SDG 3 (*Good Health and Well-Being*) melalui pelatihan dengan total peserta sebanyak 126 dari 30 negara.

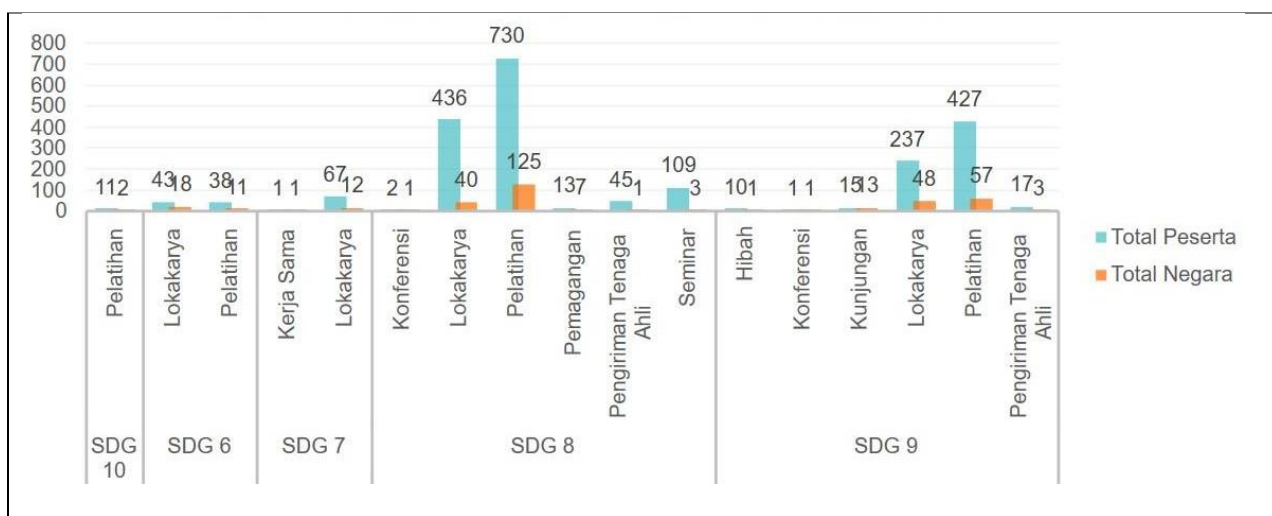
Grafik 1 – Program KSS dalam People SDGs



Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022.

Pada kategori *prosperity*, program pertama dan kedua dengan peserta terbanyak pada SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Total peserta program pertama pelatihan mencapai 730 orang dari 125 negara, sedangkan program kedua adalah lokakarya dengan peserta mencapai 436 orang dari 40 negara. Selain itu, terlihat bahwa SDG 9 (*Infrastructure, Industry, and Innovation*) cukup menonjol dalam jumlah peserta melalui program pelatihan dan lokakarya. Total peserta program pelatihan mencapai 427 orang dari 57 negara. Sedangkan total peserta lokakarya mencapai 237 orang dari 48 negara.

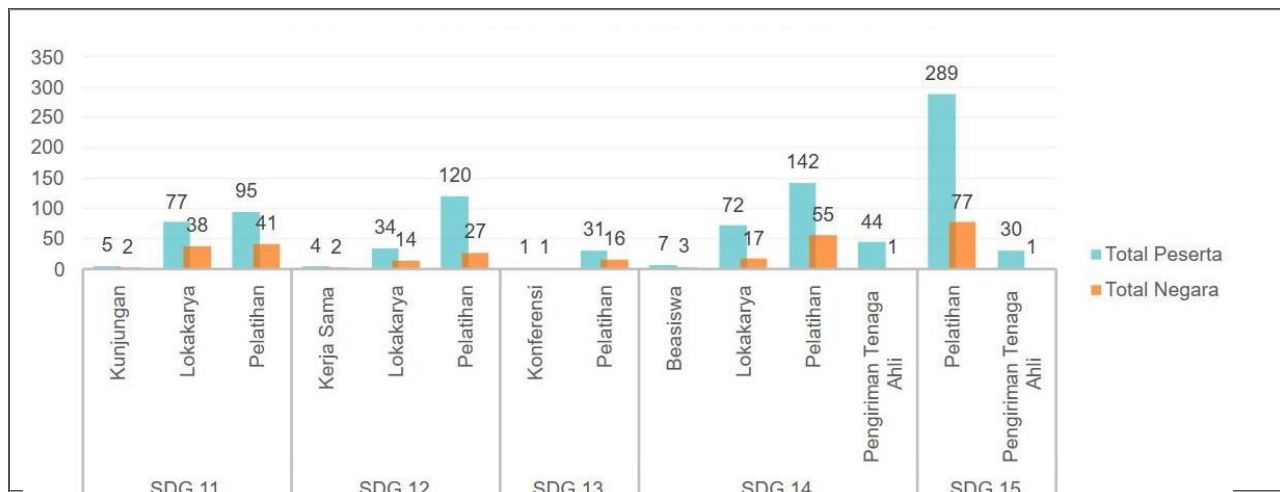
Grafik 2 - Program KSS dalam Prosperity SDGs



Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022

Kategori *planet* memperlihatkan signifikansi yang merata pada tiap SDG. Namun demikian, signifikansi paling tinggi berada pada SDG 15 (*Life on Land*) melalui program pelatihan dengan total peserta 299 orang dari 77 negara. Di samping itu, SDG 14 (*Life Below Water*) yang dilakukan melalui program pelatihan juga memperoleh signifikansi tertinggi kedua dengan 142 peserta dari 55 negara.

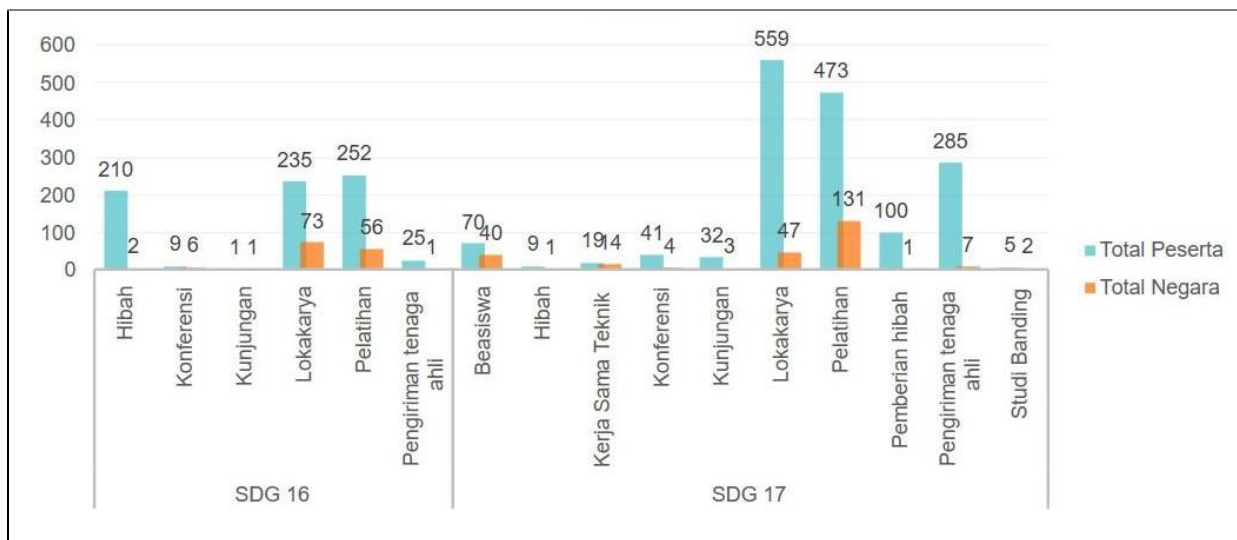
Grafik 3 - Program KSS dalam Planet SDGs



Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022

Untuk pencapaian SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) dan 17 (*Partnership for the Goals*) masih didominasi melalui program lokakarya dan pelatihan. Total peserta kedua program paling banyak berada pada SDG 17 dengan total peserta lokakarya 559 orang dari 47 negara, sedangkan total peserta pelatihan 473 orang dari 131 negara. Namun demikian, program lain yang juga signifikan selain lokakarya dan pelatihan adalah pengiriman tenaga ahli pada SDG 17. Total tenaga ahli mencapai 285 orang ke 7 negara.

Grafik 4 - Program KSS dalam Peace & Partnership SDGs



Sumber: Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, BSKLN, Kementerian Luar Negeri, 2022.

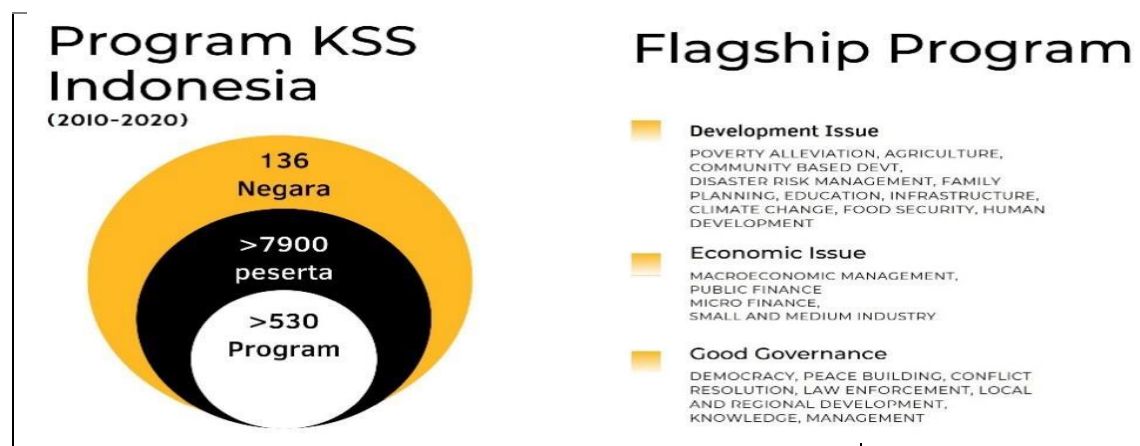
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa KSS Indonesia telah menjadi modalitas dan instrumen strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang kemudian dikembangkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Program unggulan KSS Indonesia terkait pencapaian SDGs mencakup: (a) agrikultur, *food security*, dan jaminan sosial; (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan industri; (e) pembangunan manusia; dan (f) infrastruktur. Program KSS Indonesia disusun agar memberikan manfaat politis dan ekonomi langsung, terlebih pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan besar bagi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh setiap negara di dunia (Brands & Gavin, 2020; Zakaria, 2020).

Namun demikian, perlu juga melakukan penyesuaian antara kebutuhan negara penerima dengan kepentingan Indonesia. Indonesia harus mengembangkan sendiri cara pemberian bantuan kepada negara berkembang yang membutuhkan, tidak harus selalu mencontoh negara lain ketika membantu Indonesia saat ini menjadi negara penerima bantuan. Kuncinya adalah berada di posisi penerima dan melihat kualitas seperti apa yang dirasa akan memuaskan saat Indonesia mendapatkan bantuan/hibah. Di masa depan, penyelenggaraan program-program KSS diharapkan tidak hanya memberikan manfaat politis seperti dukungan bagi kesatuan NKRI, tetapi juga dapat memiliki manfaat ekonomi langsung seperti membuka akses pasar dan peluang investasi bagi pelaku usaha

Indonesia di negara-negara berkembang. Secara politis, manfaat KSS bagi Indonesia terkait dengan menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan, memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia di level regional dan internasional, dan meningkatkan citra positif Indonesia. Pada bidang ekonomi, program KSS Indonesia juga diharapkan dapat lebih membuka peluang perdagangan dan meningkatkan kerja sama investasi Indonesia, serta lebih meningkatkan ekspor barang dan jasa, khususnya dari sektor UMKM. Selain itu secara sosial budaya, berbagai program KSS Indonesia juga berkaitan dengan upaya lebih menciptakan *foot print* Indonesia, meningkatkan *people-to-people contact*, meningkatkan kerja sama/promosi pariwisata, budaya dan pendidikan, serta kapasitas SDM dan teknologi Indonesia menjadi turut meningkat dan terekspos secara internasional.

Peningkatan peran non-pemerintah dan swasta perlu terus didorong untuk mendukung program KSS. Selama satu dekade KSS Indonesia, produk-produk dari aktor-aktor non-pemerintah dan swasta semakin banyak memainkan peran penting, sehingga ke depannya kolaborasi aktor-aktor ini perlu dikembangkan dengan aktor pemerintah.

Gambar 2 - Flagship Program KSS Indonesia (2010-2020)



Sumber: Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, 2021

Tantangan ke Depan

LDKPI sebagai cikal bakal *Single Agency* bagi KSS Indonesia ke depannya akan memegang peranan yang semakin vital. Peran LDKPI sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat menjadi lembaga pembangunan internasional yang independen dan memiliki kapasitas institusi, sumber daya manusia (SDM), serta keuangan. Dengan demikian, diharapkan sumber pendanaan KSS Indonesia tidak lagi bergantung dari

Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Sumber pendanaan bagi program KSS ke depan direncanakan menggunakan pola yang mandiri dan berkesinambungan (*self-sustained*), di mana anggaran untuk pelaksanaan program KSS akan bersumber dari dana abadi untuk kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*).

Terkait dana pembangunan internasional yang bersumber dari dana abadi, dana tersebut diinvestasikan dalam sejumlah instrumen keuangan, di antaranya surat utang pemerintah. Pada tahun 2020 dan 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3 triliun dan akan terus ditambah hingga mencapai Rp. 10 triliun di tahun 2025. Hal ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan/kerja sama yang nilainya cukup besar, serta variasi bentuk bantuan/kerja sama yang tidak terbatas pada penyelenggaraan program peningkatan kapasitas.

Dalam formulasi program, kerja sama ekonomi dapat menjadi prioritas utama dengan tetap melakukan penguatan pada sektor kerja sama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu dan teknologi. Dengan adanya prioritas tersebut, perluasan program dapat diberikan beberapa elemen untuk langsung meningkatkan kerja sama ekonomi dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyelenggaraan program-program KSS diharapkan tidak hanya memberikan manfaat politis seperti dukungan bagi kesatuan NKRI, tetapi juga dapat memiliki manfaat ekonomi langsung seperti membuka akses pasar dan peluang investasi bagi pelaku usaha Indonesia di negara-negara berkembang.

Ke depannya, peran aktor-aktor non-pemerintah dalam KSS Indonesia juga perlu terus dikembangkan. Hal ini sedikit banyak telah dilakukan melalui penggunaan produk-produk Indonesia dan keterlibatan BUMN/perusahaan Indonesia dalam beberapa program KSS Indonesia. Peningkatan peran KSS Indonesia akan membutuhkan penguatan lembaga otonom yang secara khusus dapat melakukan koordinasi dan menggunakan kombinasi kapasitas Kementerian dan Lembaga pelaksana program KSS.

Tantangan ke depan lainnya adalah bagaimana melakukan penguatan strategi komunikasi KSS agar lebih dikenal publik (termasuk *branding*), identifikasi kebutuhan mitra dan potensi Pemerintah RI sehingga memerlukan *grand design* KSS Indonesia, pencocokan permintaan dan penawaran, pengayaan program), dan monitoring dan evaluasi kemanfaatan yang terintegrasi. Untuk itu, perlu dipikirkan sejumlah strategi terkait upaya melakukan: (a) penguatan strategi komunikasi KSS agar lebih dikenal

publik (termasuk *branding*); (b) identifikasi kebutuhan mitra dan potensi Pemerintah RI sehingga perlu *grand design* KSS Indonesia; (c) penyocokan permintaan dan penawaran; (d) pengayaan program; dan (e) monitoring dan evaluasi kemanfaatan yang terintegrasi.

Salah satu mitra KSS Indonesia, *Non-Aligned Movement-Center for South-South Technical Cooperation* (NAM-CSSTC) menyatakan bahwa NAM CSSTC merupakan salah satu mitra pembangunan Indonesia untuk kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular*, dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada negara-negara berkembang untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi mitra (UI, UGM, *Telkom University*, *University of Bangladesh*, *University of Sao Paulo*). Di samping itu, NAM CSSTC bekerja sama dengan Pemerintah RI memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dengan sertifikat terakreditasi (Supraba, 2022).

NAM-CSSTC didirikan pada Konferensi NAM ke-11 tahun 1995 di Cartagena, Kolombia, atas prakarsa Brunei Darussalam dan Indonesia, dan dengan visi memperkuat kapasitas kolektif dan kemandirian negara berkembang. Jumlah program KSS yang telah dilaksanakan NAM-CSSTC adalah 130 program dengan melibatkan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dan Kemlu. Pada 2012-2017 program diikuti 985 peserta dari 52 negara dengan capaian: (a) publikasi artikel ilmiah terindeks Scopus; (b) demokratisasi; (c) pengurangan pengangguran; (d) peningkatan kesadaran akan keberadaan teknologi medis; dan (e) transfer pengetahuan teknik untuk tingkatkan pariwisata.

Pada 2018-2020 terjadi peningkatan 69% partisipasi yaitu 1.580 peserta dari 75 negara. Hal yang berhasil dicapai: (a) peningkatan kapasitas pengelolaan produk perikanan; (b) peningkatan hasil pertanian buah dan sayuran, terutama pertanian yang membutuhkan sedikit air, ruang, dan hidroponik; (c) penyebarluasan *platform* basis data teknologi di Asia-Pasifik untuk hubungkan investor dengan pengguna potensial; dan (d) peningkatan persiapan dan kesiapsiagaan petugas kesehatan Timor-Leste. Capaian kegiatan pada 2021 yaitu terdapat 13 program diikuti 58 negara (yang paling sering mengikuti adalah Kepulauan Solomon, India, Bangladesh, dan Fiji).

Skema KSS dan *Triangular* dapat menjadi alternatif penguatan *soft power* bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di sesama negara berkembang. Hal ini juga diungkapkan oleh mitra kerja sama *triangular* KSS Indonesia. *Advisor for Capacity Development for South-South and Triangular Cooperation*, JICA, Tomoyuki Tada (2022)

dalam salah satu kegiatan webinar nasional menyatakan bahwa sejak menjadi *middle-income country*, Indonesia telah berkembang menjadi “*new aid donor*” dengan memberikan bantuan kerja sama teknik maupun hibah. Selain itu juga disampaikan bahwa Jepang sebagai mitra pembangunan tradisional Indonesia saat ini juga memfokuskan pada kerja sama triangular untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, dengan menggunakan *expertise* Indonesia.

Masa Depan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia

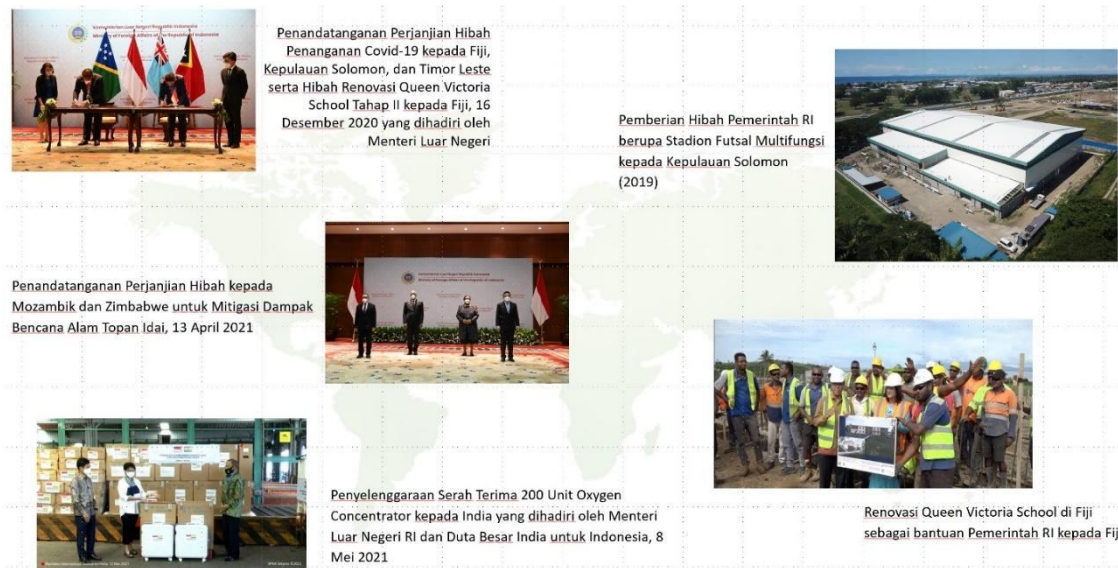
Kerja sama Selatan-Selatan telah menjadi alat yang sangat strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan perannya sebagai *new emerging donors*. Dengan posisi ini, Indonesia dapat melaksanakan peran gandanya yaitu sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan. Peningkatan peran Indonesia sebagai pemberi bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Posisi sebagai *new emerging donors* ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan/kerja sama yang nilainya cukup besar, serta variasi bentuk bantuan/kerja sama yang tidak terbatas pada penyelenggaraan program peningkatan kapasitas. Program-program KSS Indonesia dapat diperluas sehingga dapat memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang semakin kompleks. Kerja sama ekonomi dapat menjadi prioritas utama program KSS dengan tetap melakukan penguatan pada sektor kerja sama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu dan teknologi.

Dalam salah satu kegiatan *Focused Group Discussion* (FGD) Refleksi Satu Dekade KSS Indonesia, berkenaan dengan Laporan Tim Kornas KSS Indonesia di Bandung tanggal 2-3 Desember 2021, Tim Kornas KSS Indonesia menyatakan dinamika perubahan arah program KSS di masa depan yang berkaitan dengan SDGs 2030 maupun kepentingan ekonomi Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2021; Putri, 2021).

Penyelenggaraan program-program KSS diharapkan tidak hanya memberikan manfaat politis seperti dukungan bagi kedaulatan NKRI, tetapi juga dapat memiliki manfaat ekonomi langsung seperti membuka akses pasar dan peluang investasi bagi pelaku usaha Indonesia di negara-negara berkembang. Ke depan, peran para aktor non-pemerintah dalam KSS Indonesia perlu terus dikembangkan. Hal ini sedikit banyak telah dilakukan melalui penggunaan produk-produk Indonesia dan keterlibatan BUMN/perusahaan Indonesia dalam beberapa program KSS Indonesia.

Gambar 3 - Capaian Kerja Sama Selatan-Selatan



Sumber: Direktorat KSPI, Kementerian Luar Negeri, 2022.

Peningkatan peran KSS Indonesia tentunya perlu diikuti dengan penguatan lembaga otonom yang secara khusus dapat mengkoordinasikan dan mengombinasikan kapasitas kementerian dan lembaga pelaksana program KSS. Peningkatan peran KSS Indonesia diharapkan dapat mengokohkan posisi Indonesia sebagai *new emerging donors* sehingga dapat meningkatkan citra Indonesia di forum internasional (Wæver & Newmann, 1997).

Simpulan

Kerja sama Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024. Manfaat kerja sama Selatan-Selatan bagi Indonesia antara lain: (a) sebagai jembatan antara kebutuhan penerima manfaat dan kepentingan Indonesia; (b) upaya meningkatkan citra positif Indonesia di kawasan dan global; (c) implementasi diplomasi ekonomi Indonesia. Pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan tidak dapat dilepaskan dari kiprah diplomasi Indonesia melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Kerja sama Selatan-Selatan bertujuan saling berbagi pengetahuan, keterampilan, *expertise*, dan sumber daya untuk menggapai agenda pembangunan dan mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 seperti saat ini, kerja sama Selatan-Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kerja sama pembangunan yang

dapat menjadi sarana untuk pemulihan kondisi dan *building back better* dalam pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pengembangan program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia ke depan diharapkan lebih efektif dan berdampak positif serta memperkuat hubungan Indonesia dengan negara dan masyarakat penerima. Program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia akan terus berkembang dan diharapkan dapat memperoleh ide-ide baru mengenai skema kerja sama yang dapat dilaksanakan dengan mitra pembangunan. Program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia terutama di bidang-bidang seperti: (a) agrikultur, *food security*, dan jaminan sosial; (b) manajemen bencana; (c) energi nuklir; (d) perdagangan dan industri; (e) pembangunan manusia; dan (f) infrastruktur dapat menjadi program unggulan KSS Indonesia ke depannya.

Selain itu, diharapkan publik dapat mengetahui berbagai program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Selanjutnya, sebagai bagian dari pendekatan konstruktivisme dalam menjalankan diplomasi Indonesia dan upaya diplomasi ekonomi guna kepentingan nasional Indonesia, diperlukan juga upaya lebih meningkatkan peran aktor non-pemerintah yang lebih aktif dan dukungan publik atas program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia. Diharapkan masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dapat berperan lebih aktif dalam kerja sama Selatan-Selatan Indonesia, termasuk pengembangan program kerja sama Selatan-Selatan Indonesia ke depan.

Daftar Pustaka

- Brands, H., & Gavin, F. J. (2020). *Covid-19 and World Order*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1353/book.77593>
- Dinnata, H. Z., & Nuraeni, N. (2020). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26067>
- Fitriani, & Panduwinata, V. C. (2018). analisis kinerja kementerian luar negeri (2015-2018). *CSIS Working Paper Series*, 3, 1–40.
- Gewati, M. (2019). *Wapres JK: Pendirian LDKPI Jadi Perwujudan “Diplomasi Tangan di Atas.”* Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/19244901/wapres-jk-pendirian-ldkpi-jadi-perwujudan-diplomasi-tangan-di-atas>
- Gilpin, J. M. (2000). *The World Economy in the 21st Century*. Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv36zqhs>
- Griffiths, M. (1999). *Fifty Key Thinkers in International Relations*.
- Hadiwinata, B. S. (Bob S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional : arus utama, alternatif, dan reflektivis*.

- Hakim, L., Mas'ood, M., & Sugiono, M. (Eds.). (2021). *The Global South: Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional*. Gajah Mada University Press.
- Haryono, E. (2019). Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018 : Challenges and Opportunities. *Global Strategis*, 13(2), 49–62.
- Hutabarat, L. (2005). Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional. *Sociae Polites*, 5(22).
- Hutabarat, L. (2018). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Pasar Prospektif di Kawasan Pacific Alliance: Studi Kasus Meksiko dan Chile. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.806>
- John W. Creswell. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. (3rd ed.). Pearson Merrill Prentice-Hall.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. In *Beranda*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/tugas-dan-fungsi>
- Kementerian Luar Negeri. (2015). *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Luar Negeri. (2016). *Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. .
- Kementerian Luar Negeri. (2020). *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Luar Negeri. (2022). *Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional*,.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2010). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024*.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2020). *Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan Tahun 2019*.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2021). *Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan Tahun 2020*.
- Killian, P. M. E. (2022). ASEAN's External Economic Relations and the Limits of Its Economic Diplomacy. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.4>
- Lee, D., & Hocking, B. (2010). Economic Diplomacy. In R. A. Denmark & R. Marlin-Bennett (Eds.), *The International Studies Encyclopedia* (pp. 1216–1227). Wiley-Blackwell.
- Lee, D., & Hudson, D. (2004). The old and new significance of political economy in diplomacy. *Review of International Studies*, 30(3), 343–360. <https://doi.org/10.1017/S0260210504006102>
- Lestari, D., Wibowo, K., Setiawan, S., & Setyawan, D. (Eds.). (2020). *Dinamika kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral dalam upaya mewujudkan Indonesia maju 2045*. Gramedia Pustaka Utama.
- Masoed, M. (1994). *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES.
- Moons, S. J. V., & van Bergeijk, P. A. G. (2017). Does Economic Diplomacy Work? A Meta-analysis of Its Impact on Trade and Investment. *The World Economy*, 40(2), 336–368. <https://doi.org/10.1111/twec.12392>
- Mulyana, Y. G. H. (2022). *Webinar Nasional "Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan*

- Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama.* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nugroho, R. (2021). *Foreign Policy: Menuju Kebijakan Luar Negeri Level 4*. PT. Elex Media Komputindo.
- Putri, B. (2021). FGD Refleksi Satu Dekade KSS Indonesia. Bandung, 3 Desember 2021.
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1–2), 7–36. <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>
- Okano-Heijmans, M. (2012). Japan's New Economic Diplomacy: Changing Tactics or Strategy? *Asia-Pacific Review*, 19(1), 62–87. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678628>
- Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia. *Jurnal Politica*, 6(1).
- Rana, K. S. (2012). Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries. In K. S. Rana (Ed.), *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiations in International Relations* (pp. 201–220).
- Ruggie, J. G. (1998). *Constructing the World Polity Essays on International Institutionalisation*. Routledge.
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Strange, S. (1992). States, firms and diplomacy. *International Affairs*, 68(1), 1–15. <https://doi.org/10.2307/2620458>
- Sudaryono. (2021). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (2nd ed.). Rajawali Pers. .
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian & Pengembangan*. Alfabeta.
- Sukma, R. (2012). Soft Power and Public Diplomacy: The Case of Indonesia. In Lee. S. J. & J. Melissen (Eds.), *Public Diplomacy and Soft Power in East Asia*. Palgrave Macmillan.
- Supraba, N. (2022). *Webinar Nasional "Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama*. Universitas Muhammadiyah Malang, .
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. STIH "IBLAM".
- Tada, T. (2022). *Webinar Nasional "Satu Dekade Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia: Kepemimpinan Indonesia dalam Mendorong Solusi atas Tantangan Bersama*. Universitas Muhammadiyah Malang,.
- Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan. (2019). *Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia Yang Lebih Baik*. PT. Pentas Grafika.
- Umar Suryadi Bakry. (2017). *Dasar-dasar hubungan internasional* (1st ed.). Desindo Putra Mandiri.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Macmillan Publishing Company.
- Wæver, O., & Newmann, I. B. (1997). *The Future of International Relations: Masters in the Making*. Routledge.
- Woolcock, S. (2012a). *European Union Economic Diplomacy: The Role of the EU in External Economic Relations*. Ashgate Publishing Company.

- Woolcock, S. (2012b). Multilevel Economic Diplomacy: The Case of Investment. In N. Bayne & S. Woolcock (Eds.), *The New Economic Diplomacy : Decision Making and Negotiation in International Economic Relations* (2nd ed.). Ashgate.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zakaria, F. (2020). *Ten Lessons for A Post-Pandemic World*. World. W.W. Norton & Company Ltd.